

## Siaran Pers

### **KUNCI PENGENTASAN KETIDAKMERATAAN DAN KEMISKINAN: PENDIDIKAN TINGGI BERKUALITAS DAN WIRAUSAHA**

Pontianak (28/8) – Indonesia saat ini tengah fokus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan mengatasi masalah kesenjangan dan kemiskinan. **Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro** menyebut sasaran Indonesia adalah menurunkan ketimpangan dan penduduk di bawah garis kemiskinan sebesar lima persen pada 2025 dan *zero poverty* pada 2045. Strategi yang diimplementasikan antara lain melalui pengembangan inovasi dan teknologi dalam pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keuangan inklusif, perkuatan usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi, pengembangan inovasi serta sarana dan prasarana layak di wilayah perdesaan, peningkatan keahlian berbasis kompetensi bagi pekerja muda di kelompok 40 persen terbawah, perbaikan sistem perpajakan dan tata kelola pemerintahan daerah, pengembangan layanan dasar dan penghidupan bagi penduduk lansia, serta penumbuhan wirausaha secara berkelanjutan.

“Indonesia harus menerapkan strategi yang akurat dan tepat sasaran untuk mengatasi isu ketidakmerataan dan kemiskinan, terutama dalam menyongsong Peringatan HUT Kemerdekaan ke-100 Republik Indonesia yang akan jatuh pada 2045 mendatang,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam pidatonya di Kuliah Umum bertajuk “Pemerataan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Pulau Kalimantan” di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Senin siang. Ada tiga skenario dasar pertumbuhan ekonomi 2045, yakni dasar atau *baseline*, sedang, dan tinggi. **Skenario Dasar Pertumbuhan Ekonomi (Baseline) 2016—2045** menyebutkan rerata pertumbuhan ekonomi Indonesia per tahun mencapai 5,1 persen. Indonesia akan keluar dari *middle income trap* dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2038 serta menjadi negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar kedelapan pada 2045. Skenario ini berdasar pada gejolak global masih berpengaruh besar meski harga komoditi tinggi sebagian periode atau pertumbuhan ekonomi dunia dan harga komoditi rendah tanpa gejolak global besar.

**Skenario Dasar Pertumbuhan Ekonomi Sedang 2016—2045** menyebutkan rerata pertumbuhan ekonomi Indonesia per tahun adalah 5,7 persen. Indonesia akan keluar dari *middle income trap* dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2037 serta menjadi negara dengan produk PDB terbesar ketujuh pada 2045. Skenario tersebut mengacu pada reformasi struktural yang kurang berjalan, harga komoditi tinggi pada sebagian periode, dan pencapaian target pokok menyentuh angka yang sama dengan kondisi tiga puluh tahun lalu. **Skenario Pertumbuhan Ekonomi Tinggi 2016—2045** menyebutkan rerata pertumbuhan ekonomi Indonesia per tahun adalah 6,4 persen. Indonesia akan keluar dari *middle income trap* dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2034 serta menjadi negara dengan produk PDB terbesar keempat pada 2045. Skenario ini berpijak pada asumsi bahwa reformasi struktural berjalan sesuai harapan serta pertumbuhan ekonomi dunia relatif tinggi dan target-target pokok pembangunan tercapai dengan baik. “Untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berdampak maksimal bagi masyarakat Indonesia, maka salah satu kuncinya adalah dengan menempatkan pendidikan, terutama pendidikan tinggi, sebagai prioritas,” tegas Menteri Bambang.

Senada dengan Menteri Bambang, Rektor Universitas Tanjungpura Thamrin Usman mengungkapkan pentingnya peran pendidikan tinggi berkualitas untuk mengatasi isu ketidakmerataan dan kemiskinan di Kalimantan Barat (Kalbar). Saat ini, rasio gini Kalbar tercatat sebesar 0,34 pada 2016, menurun dari angka 0,40 pada 2011. Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Kalbar masih di bawah rerata nasional, yakni sebesar 20 persen. Artinya, hanya 20 persen dari total pemuda di Kalbar yang mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Penyebabnya, antara lain, masih banyak daerah di Kalbar yang termasuk dalam kategori area terpencil sehingga akses untuk pendidikan masih belum terbuka lebar. “Kami berkomitmen serius untuk mewujudkan target Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Kalbar sebesar 70 persen pada 2025 dengan terus melaksanakan peningkatan kualitas pendidikan dan penambahan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, termasuk tenaga dosen, dengan sasaran untuk menghasilkan lulusan yang bisa memberikan efek positif pada peningkatan ekonomi dan percepatan pertumbuhan regional,” ungkap Thamrin.

Pendidikan yang ditargetkan mampu mengatasi masalah ketidakmerataan dan kemiskinan di Kalbar memiliki tiga kriteria utama. Pertama, pendidikan konvensional dan vokasi yang memiliki kecocokan dengan kebutuhan industri agar lulusan dapat siap bekerja dan tidak menjadi pengangguran. Kedua, pendidikan yang dilaksanakan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjangkau calon peserta didik yang berada di wilayah terpencil. Ketiga, pendidikan yang menggalakkan pentingnya berwirausaha sehingga mampu menghasilkan efek domino penciptaan lapangan kerja. “Untuk menjadi negara maju, pemerintah terus mendorong pemuda Indonesia agar menjadi wirausaha dengan memperhatikan dua kunci sukses, yaitu inovasi dan penggunaan teknologi disertai penelitian dan pengembangan berkelanjutan,” tutup Menteri Bambang.

Pontianak, 28 Agustus 2017

Thohir Afandi  
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan  
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310  
Telepon: (021) 31936207, 3905650  
Faksimile: (021) 31901154  
Email: [humas@bappenas.go.id](mailto:humas@bappenas.go.id)